

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada suatu negara dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi juga menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan banyak negara menimbulkan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan berupa pemanasan global (Winter 1999).

Kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang terkait dengan proses pembangunan ekonomi yang berdampak negatif terhadap manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan perlu mendapat perhatian serius, karena kerusakan lingkungan akan mengurangi ketersediaan sumberdaya yang terbatas.

Perubahan iklim berupa pemanasan global merupakan masalah yang dialami banyak negara saat ini. Indonesia merupakan negara dengan resiko kerentanan iklim yang tinggi. Kerugian tahunan yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini tercatat sebesar 6,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (*Asean Development Bank, 2015*).

Protokol Kyoto yang diadakan tahun 1997 diikuti oleh 37 negara, merupakan komitmen yang disepakati dunia internasional sebagai wujud kepedulian atas kondisi lingkungan tentang penerapan mekanisme pembangunan bersih. Komitmen ini bertujuan untuk membatasi tingkat maksimum emisi gas rumah kaca. Disepakati akan terjadi pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 75% pada periode tahun 2008-2012. Copenhagen Accord yang dilaksanakan di

Pittsburg tahun 2009 juga menghasilkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26%-41% pada tahun 2020. Komitmen lingkungan ini dipertegas dengan komitmen Indonesia tahun 2010 di Bali, Indonesia menyerukan tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan dengan menjalankan 10 arahan. Salah satunya adalah memperkuat ekonomi dengan ekonomi hijau.

Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang dilaksanakan berbasis kepedulian terhadap lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ekonomi hijau merupakan pelindung dari dampak kapitalis berupa efek sistemik dari ketidakadilan dan masalah buruk lingkungan (Morrissey 2012). Beberapa temuan mengungkapkan bahwa jika hanya 5% saja dari penduduk bumi yang mengkonsumsi 25% sumber energi, maka dibutuhkan jaminan kemampuan negara untuk mengembangkan sumber daya alamnya (Bran dan Ioan 2012). Permasalahan ini diperkuat oleh temuan bahwa diperkirakan tahun 2030 hanya 30% kota yang peduli terhadap lingkungan kota sedangkan 80% gas emisi rumah kaca adalah dari wilayah perkotaan (Morrissey 2012).

Emisi secara umum bersumber dari kerusakan lingkungan karena adanya penyusutan sumberdaya yang tidak terbarukan, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan kualitas lingkungan menurun sejalan dengan meningkatnya emisi lingkungan (Saito and Yakita 2008). Oleh sebab itu krisis pertumbuhan lingkungan harus diimbangi dengan kepedulian manusia terhadap lingkungan.

Krisis lingkungan tidak hanya butuh perubahan dalam kebijakan publik tapi juga perubahan sikap individu. Prilaku manusia dalam ekonomi menentukan kualitas dari lingkungan. Untuk itu, masyarakat dengan tingkah lakunya bisa mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang didasarkan pada inovasi (Tucker dan Gring 2001). Selain itu diperlukan juga peningkatan penelitian tentang lingkungan dan pertumbuhan ekonomi (Rickocsi 2012). Perkembangan teknologi dan perubahan pemahaman tentang pemanfaatan sumberdaya menjadi bagian penting dalam proses pembangunan yang peduli kelestarian lingkungan

Tidak ada definisi tentang bagaimana pola menjadi lebih baik (pola yang telah mengadopsi ekonomi hijau). Ketika suatu perusahaan atau produk mengklaim sudah menjadi ekologi dan memperkenalkan produk ekologi, sering ditanggapi skeptis oleh konsumen (Popescu and Zamfir 2002). Merubah orientasi konsumen sangat sulit, hal ini diduga karena adanya konsekuensi konsumen harus membayar lebih mahal dibandingkan produk lainnya (Roper 2007). Konsumen yang tidak percaya bahwa ekologi produk berfungsi untuk konservasi lingkungan berjumlah sekitar 42%. Data yang ada memperlihatkan bahwa hanya 12% penduduk Amerika menggunakan produk ramah lingkungan secara rutin dan 68% lainnya pada saat tertentu saja (Hanas 2007).

Keuntungan penerapan ekonomi hijau bisa dilihat dari sisi perusahaan dan negara. Bagi perusahaan yang memperluas produksi dengan produk ramah lingkungan justru mengalami peningkatan profit dan keuntungan dibandingkan perusahaan lain yang tidak ramah lingkungan. Kondisi ini disebabkan karena perusahaan akan memiliki efisiensi dalam alokasi ketersediaan sumberdaya. Pengembangan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan akan membuka

pasar baru dan meningkatkan daya saing perusahaan. Beberapa hasil penelitian di Amerika Serikat dan Jerman menemukan bahwa industri sumber daya terbarukan yang dikembangkan bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik dari segi fiskal.

Pelaksanaan ekonomi hijau bagi suatu negara bukan merupakan hal yang mudah. Tidak semua negara mampu berbuat menjadi lebih hijau dalam ekonomi, dimana negara-negara berkembang tidak dapat menetapkan kebijakan lingkungan yang efisien. Negara berkembang hanya dapat memperoleh manfaat dari bantuan internasional yang mendirikan lembaga lingkungan yang efektif (John dan Manuelli 1995). Negara miskin hanya menggunakan teknologi yang tidak peduli lingkungan, namun setelah melewati titik tertentu baru bisa beralih ke teknologi yang peduli akan kelestarian lingkungan (Stokey 1998). Kondisi ini disebabkan karena pelaku ekonomi berperilaku tanpa memperhitungkan nilai sumber daya alam dan tidak memiliki insentif untuk melestarikan atau mengembalikan kondisi lingkungan. Bahkan ditemukan pengurangan emisi di negara tertentu sejalan dengan peningkatan emisi di negara lain, karena adanya pengalihan emisi negara maju ke negara berkembang (Newell, Pizer and Raimi 2013).

Pada negara-negara berkembang, meskipun kegiatan ekonomi hijau telah ada, namun pengukuran efektivitasnya dalam mencapai sasaran jarang dilakukan. Demikian juga dengan dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi belum menjadi perhatian yang serius. Literatur dan penelitian yang membahas konsep pembangunan berwawasan lingkungan masih terbatas hingga saat ini. Pengembangan ekonomi makro di negara-negara berkembang masih jauh dari konsep hijau. Ekonomi hijau sepertinya masih sebatas wacana dan

slogan. Hal tersebut terjadi karena pengembangan ekonomi selama ini mengabaikan keberlanjutan.

Negara maju cenderung lebih memiliki kemampuan yang baik dalam berproduksi dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dibanding negara berkembang. Negara maju dengan kemampuan ekonomi dan teknologi yang sudah mapan melaksanakan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan dengan menerapkan peraturan perlindungan yang tegas.

Pembiayaan ekonomi hijau adalah suatu isu yang besar, untuk ini kita memerlukan pergeseran sumber daya keuangan. Pelaksanaan konsep ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi memerlukan perubahan dalam kebijakan finansial negara. Oleh sebab itu, penyesuaian target pembangunan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa konsep pembangunan ekonomi dengan dasar ekonomi hijau yang memperhitungkan lingkungan menjadi penting. Kapasitas bumi yang terbatas seharusnya menjadi motivasi bagi masyarakat dan pemerintah untuk peduli terhadap lingkungan (Tucker dan Gring 2001). Ekonomi hijau memerlukan upaya terpadu, berakar pada kebijakan yang sehat dan berani untuk mengarahkan pasar energi kearah yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaan konsep ekonomi hijau, karena penerapan ekonomi hijau memerlukan perubahan mendasar pada perilaku dan kebijakan pembangunan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat harus bisa beranjak dari pola pencapaian pertumbuhan ekonomi konvensional, yang lebih berorientasi kepada besarnya nilai pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bukan pada kualitas proses pembangunan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan ekonomi hijau harus dilakukan sebagai upaya pelestarian sumber daya dan pencapaian pembangunan berkelanjutan, maka pelaksanaan ekonomi hijau merupakan keharusan.

Konsep ekonomi hijau sudah berkembang sejak lama, bermula dari konsep batas pertumbuhan ekonomi oleh Meadows dari kelompok Roma yang mengingatkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi dan konsumsi sumber daya alam tetap seperti tahun 1970-an maka sumber daya akan terkuras habis dan lingkungan menjadi rusak serta menjadi batas pertumbuhan ekonomi dunia (Meadows 1972). Hal ini menandai munculnya pemikiran ekonomi berkelanjutan (*Bruntland Commission 1972*), pendapatan berkelanjutan dan pendapatan hijau.

Konsep ekonomi konvensional yang selama ini populer digunakan tidak memperhitungkan dimensi lingkungan berupa penyusutan (deplesi) sumberdaya alam dan kerusakan (degradasi) lingkungan, meskipun pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pada konsep ekonomi konvensional ini nyata merupakan kontribusi modal alami terhadap pembangunan ekonomi (Ratnaningsih, Apriliani, Sudharto, dan Suparmoko 2006). Hal ini terlihat jelas dalam perhitungan PDB konvensional yang hanya memasukkan penyusutan sumber daya buatan manusia, tetapi belum menampilkan penyusutan sumber daya alam dan degradasi lingkungan sebagai akibat hilangnya modal alami dalam proses produksi. Deplesi sumberdaya alam mengurangi modal alami dan degradasi lingkungan mengurangi kapasitas produksi sekaligus menyerap modal finansial demi perbaikan kondisi lingkungan.

Nilai yang didapat dari konsep konvensional ini dianggap dapat memberikan persepsi dan konsekuensi yang keliru terhadap arah pembangunan dan tidak memperhitungkan konsep keberlanjutan pembangunan dimasa yang akan

datang. Ekonomi berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi sosial yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ekonomi yang mengadopsi pendekatan modal, hanya fokus pada ketersediaan modal sebagai dasar pembangunan dan mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa memberikan dan memperhitungkan kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumberdaya. Hal ini secara tegas dianggap sebagai kelemahan dalam PDB konvensional

Nilai PDB seharusnya dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang keadaan perekonomian suatu negara, tidak hanya menyangkut hasil yang dicapai dalam besaran PDB, tapi juga bagaimana dampak dari pencapaian pembangunan tersebut. Proses pembangunan yang dilakukan harus menjamin keberlanjutan pembangunan untuk generasi yang akan datang. Sementara itu, proses pembangunan yang dilakukan menyebabkan kelangkaan sumberdaya untuk proses pembangunan berikutnya. Hal ini sangat berguna untuk menilai kinerja ekonomi serta dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan ekonomi tentang proses pembangunan yang sebenarnya terjadi (Samuelson and Nordhaus 1995).

Kinerja PDB, kapital, tenaga kerja dan investasi masih menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi suatu negara baik dengan konsep konvensional maupun ekonomi yang berorientasi lingkungan. Di lain pihak, arus globalisasi dan perubahan dalam pola perdagangan juga memberikan kontribusi pada proses pembangunan yang dilakukan. Kebijakan keterbukaan perdagangan dianalisis oleh banyak peneliti yang menemukan adanya hubungan yang erat antara keterbukaan perdagangan dengan pertumbuhan hijau (Talberth dan Bohara, 2006).

Komponen keterbukaan perdagangan sebagai akibat dari globalisasi pasar perlu diperhitungkan dalam kajian model ekonomi hijau karena keterbukaan perdagangan berhubungan dengan regulasi dan akses terhadap sumberdaya ekonomi suatu negara yang juga direalisasikan dalam kegiatan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Abdouli dan Hammi (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh nilai investasi asing langsung serta kemudahan dalam proses perdagangan yang tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif, seperti polusi.

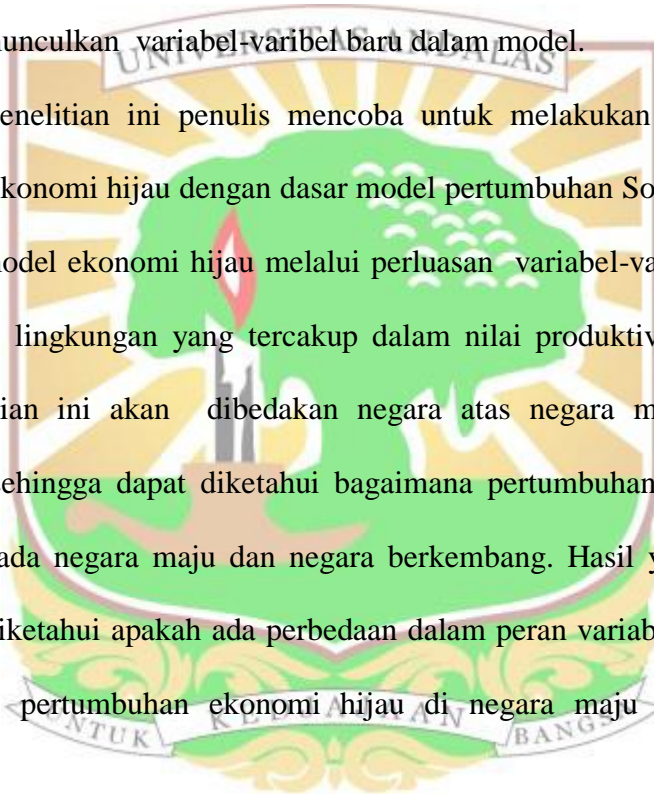
Kajian tentang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan saat ini masih terbatas pada pengujian model pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan konvensional (Solow 1956); Mankiw, Romer dan Well 1992) Penelitian yang berhubungan dengan bagaimana suatu negara bisa tumbuh dalam tingkat yang berbeda dengan Negara lain dilakukan oleh Robert E. Lucas (1990). Kemudian Anand, Ceng, Rehman dan Zhang (2014) mengidentifikasi faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi dimana hal yang sama juga dilakukan oleh Barro dan Sala-i-Martin (1995).

Kajian tentang ekonomi hijau juga masih terbatas pada usaha menghitung nilai PDB hijau (Arief Anshory Yusuf (2011) dan indentifikasi faktor penentu PDB hijau antar daerah seperti yang dilakukan Talberth dan Bohara (2006) dan Wang (2011). Kajian kebijakan optimal alokasi anggaran pemerintah pada pengurangan emisi dilakukan oleh Saito dan Yakita, (2008) sementara Brock dan Taylor (2015) mengkaji The Enviromental Kuznet Curve (EKC) dengan melihat hubungan antara pendapatan perkapita dan emisi karbon. Selanjutnya kajian oleh Ocampo (2011)

mencoba memberikan dasar konsep pengembangan ekonomi hijau sebagai sebuah perspektif.

Model pertumbuhan Solow banyak digunakan dalam kajian teori pertumbuhan ekonomi konvensional maupun ekonomi hijau. Model pertumbuhan Solow merupakan model dasar yang bisa diaplikasikan secara umum dan bisa diterima pada berbagai keadaan ekonomi suatu negara. Model Solow dengan adanya nilai residual memungkinkan untuk dilakukan pengembangan model sehingga memunculkan variabel-variabel baru dalam model.

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk melakukan perluasan teori pertumbuhan ekonomi hijau dengan dasar model pertumbuhan Solow dengan cara membangun model ekonomi hijau melalui perluasan variabel-variabel yang bisa mempengaruhi lingkungan yang tercakup dalam nilai produktivitas faktor total. Dalam penelitian ini akan dibedakan negara maju dan negara berkembang, sehingga dapat diketahui bagaimana pertumbuhan Ekonomi hijau yang terjadi pada negara maju dan negara berkembang. Hasil yang diharapkan adalah dapat diketahui apakah ada perbedaan dalam peran variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hijau di negara maju maupun negara berkembang.



1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan pada pendahuluan maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah :

“Bagaimana pengaruh variabel-variabel pertumbuhan ekonomi dengan faktor lingkungan pada pembentukan nilai PDB hijau untuk kelompok negara maju dan negara berkembang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

“Menganalisis bagaimana pengaruh variabel-variabel pertumbuhan ekonomi dengan faktor lingkungan pada pembentukan nilai PDB hijau untuk kelompok negara maju dan negara berkembang”.

1.4 Kontribusi/Manfaat Penelitian

1. Menghasilkan temuan desain model PDB hijau dengan variabel lingkungan berupa keterbukaan ekonomi dan investasi asing langsung melalui perluasan model dasar pertumbuhan ekonomi Solow.
2. Temuan empiris variabel penentu PDB hijau pada kelompok negara maju dan negara berkembang.
3. Rekomendasi untuk pengembangan teori dalam model PDB hijau yang memperhitungkan faktor lingkungan dan kebijakan ekonomi dengan memperhatikan faktor lingkungan .

